

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan Joko Widodo dari tahun 2014 hingga sekarang banyak menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membuat kemajuan Negara Indonesia, dari masa ke masa pemerintahan Indonesia sangatlah aktif dalam setiap konvensi internasional yang selalu berhubungan dengan Indonesia sebagai negara berkembang dan sangat aktif sebagai anggota suatu organisasi internasional, salah satu organisasi internasional yang dimana negara ini menjadi anggota dan sangat aktif adalah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia bergabung pada WHO dari 23 Mei 1950. Banyak kebijakan pemerintah Indonesia yang terbentuk dari perjanjian-perjanjian WHO tersebut, pemerintah turut serta dalam kesehatan dunia dan masyarakat negaranya dengan mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO.

WHO FCTC dibuka untuk penandatanganan pada 16 Juni sampai 22 Juni 2003 di Jenewa, dan kemudian di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Depositary of the Treaty, dari 30 Juni 2003 hingga 29 Juni 2004. Perjanjian, yang sekarang ditutup untuk ditandatangani, memiliki 168 Penandatanganan, termasuk Komunitas Eropa, yang menjadikannya salah satu yang paling luas merangkul perjanjian dalam sejarah PBB. Negara Anggota yang telah menandatangani Konvensi menunjukkan bahwa mereka akan berusaha dengan niat baik untuk meratifikasi, menerima, atau menyetujuinya, dan tidak menunjukkan komitmen politik untuk merusak tujuan yang ditetapkan di dalamnya. Negara-negara ingin menjadi Partai, tetapi itu tidak terjadi menandatangani Konvensi pada tanggal 29 Juni 2004, dapat melakukannya dengan cara akses, yang merupakan satu langkah proses yang setara dengan ratifikasi. Konvensi mulai berlaku pada 27 Februari 2005 - 90 hari setelahnya disetujui, diratifikasi, diterima, atau disetujui oleh 40 negara. Mulai saat itu para pihak terikat secara hukum oleh ketentuan perjanjian itu. Untuk setiap

Negara yang meratifikasi, menerima atau menyetujui Konvensi atau menyetujui setelah kondisi yang ditetapkan dalam paragraf 1 dari Pasal 36 mulai berlakunya telah dipenuhi, Konvensi mulai berlaku hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses. Untuk organisasi integrasi ekonomi regional, Konvensi dimasukkan mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyeteroran instrumen formal konfirmasi atau akses. Jaringan global yang dikembangkan selama periode negosiasi FCTC WHO akan menjadi penting dalam mempersiapkan implementasi Konvensi di tingkat negara. Dalam Kata-kata Direktur Jenderal WHO, Dr Jong-wook LEE: "Perundingan WHO FCTC telah menghasilkan proses yang demikian dalam perbedaan yang terlihat di tingkat negara. Keberhasilan FCTC WHO sebagai alat kesehatan masyarakat akan bergantung pada energi dan komitmen politik, yang kami dedikasikan untuk menerapkannya di negara-negara di tahun-tahun mendatang. SEBUAH hasil yang sukses adalah keuntungan kesehatan masyarakat global untuk semua." (WHO, 2010).

WHO pada tahun 2003, mengeluarkan perjanjian untuk anggotanya dalam rangka kesehatan masyarakat, perjanjian tersebut dikenal sebagai FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control yang dimaksudkan untuk melindungi generasi muda suatu negara dalam hal dampak penggunaan tembakau yang berlebih, perjanjian ini diinisiasi oleh beberapa negara berkembang sekaligus negara anggota WHO, negara yang menginisiasi perjanjian ini diantara lain adalah Amerika Latin, India, Thailand, dan Indonesia. Perjanjian ini muncul karena adanya kegelisahan negara-negara tentang dampak dari penggunaan tembakau yang tidak terkontrol dengan kebijakan yang kuat, diperkirakan pada akhir abad 21 1 Milyar penduduk dunia akan meninggal dan hampir 70% dari negara berkembang (unknown, apa itu fctc?, 2015), hal ini disebabkan karena penggunaan tembakau ataupun paparan asap rokok.

Penelitian ini akan membahas sikap pemerintah Indonesia dari masa ke masa sebelum jauh membahas apa saja faktor dan dampak akses FCTC ini, perjanjian FCTC mulai dibahas didalam WHO dimulai dari periode kedua Presiden Susilo

Bambang Widoyono, sikap presiden SBY yang menolak meratifikasi FCTC karena, pembahasan FCTC harus dibahas dengan DPR dan elemen masyarakat yang terdampak karena perjanjian ini, dilain sisi SBY tidak meratifikasi hal tersebut karena secara politis tidak memberi dampak terhadap kepemimpinannya sebagai presiden di akhir masa jabatannya. Selain pemerintahan SBY, pemerintahan Jokowi yang dimulai dari 2014 hingga sekarang juga belum sama sekali mengaksesi FCTC sebagai andil dalam kesehatan dunia, karena pemerintah masih menganggap Tembakau dan industrinya sebagai salah satu penompang perekonomian masyarakat dan negara ini, dapat dilihat bahwa indonesia mempunyai banyak industri yang bergerak dibidang produksi dan pengolahan tembakau yang dimana faktanya menjadi lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat.

Penelitian ini akan mencoba mengulas faktor-faktor yang menjadikan alasan kuat kenapa pemerintah era Joko Widodo belum melakukan aksesi FCTC, akan tetapi peneliti menemukan sudah ada beberapa artikel atau penelitian yang membahas topik ini akan tetapi tidak mendeskripsikan faktor-faktor tersebut, sekiranya peneliti menemukan adanya 4 artikel yang hampir sama dengan penelitian ini, artikel pertama dikeluarkan oleh repository Universitas Airlangga, dalam artikel tersebut penulis memberikan informasi bahwa ada dua faktor yang kuat mengapa Jokowi belum melakukan aksesi FCTC, faktor internal yaitu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dan undang-undang dalam pengendalian tembakau jauh sebelum adanya FCTC yang dikeluarkan oleh WHO, dan faktor eksternalnya adalah pemerintah Indonesia merasa adanya kekurangan dalam perjanjian ini berupa stimulus dari masyarakat internasional (Anggraini, 2016). Penelitian lain yang penulis temukan adalah artikel yang dikeluarkan oleh dari kontan.co.id , dalam artikel ini penulis menekankan bahwa indonesia masih mempunyai UU no 36 tahun 2009 tentang pengendalian tembakau yang mirip dengan perjanjian FCTC (Nugroho, 2010), ada satu penelitian tugas akhir dari Universitas Muhammadiyah Malang yang mengambil kasus di negara Brunai Darussalam (rizky, 2015), penulis menggambarkan bahwa negara tersebut meratifikasi FCTC karena pemerintah sangat yakin dalam

pengendalian tembakau dan rokok merupakan faktor utama dalam kasus kematian disana.

Penelitian ini akan membahas dari perspektif pemerintah Indonesia sebagai aktor sebuah negara dan pihak yang mempunyai otoritas untuk mengatur negaranya, serta harus menjadikan warga negaranya kepada hal yang lebih baik, pemerintah Indonesia selama periode presiden Joko Widodo selalu mengutamakan adanya kemajuan dalam perekonomian masyarakat diberbagai lini yang ada, berbicara tentang tembakau tidak bisa lepas dengan masyarakat Indonesia, penggunaan tembakau dalam rokok kretek sudah menjadi budaya yang melekat di masyarakat, maka dari itu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada karena didalam penelitian ini, penulis akan mencoba membuka aspek selain ekonomi dan kesehatan yang menjadi faktor dalam pengambilan keputusan pemerintah yang belum melakukan akses FCTC sampai saat ini, sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia mempunyai komoditas tembakau yang sangatlah besar sehingga secara otomatis masyarakat banyak yang menggantungkan hidupnya dari adanya tembakau dan industri rokok tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia belum melakukan Akses FCTC?

1.3 Landasan Teori

Untuk menjelaskan penelitian ini, penulis menggunakan teori sistem politik dari David Easton, analisis input-output dalam artikelnya "The Analysis of Political Systems" yang diterbitkan dalam "World Politics" pada tahun 1957. Ini seperti sebuah kotak kecil yang terdiri dari dua set input, satu mekanisme output dan umpan balik ke sisi input. Di sisi input, Easton memasukkan tuntutan dan dukungan. Tuntutan adalah nama tekanan yang mengalir dari lingkungan ke sistem politik untuk membawa perubahan dalam alokasi nilai skor. Dan dukungan adalah input kedua. Ini

adalah energi dalam bentuk tindakan atau orientasi yang mempromosikan dan menentang sistem politik. Tapi di sini muncul pertanyaan apa fungsinya bagi masyarakat. Jawabannya adalah pembuatan kebijakan. Di sinilah konsep keluaran Easton. Output adalah keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh otoritas. Selanjutnya kebijakan yang dibuat oleh penguasa didukung oleh rakyat atau tidak. Dengan demikian respon atau reaksi publik terhadap keluaran merupakan umpan balik ke dalam sistem masukan. Sekali lagi sistem mengubahnya menjadi output. Proses siklus input, output dan mekanisme umpan balik ini merupakan analisis input-Output Easton, yang membuat keputusan bagi masyarakat.

- **Analisis input dan output**

Input adalah tekanan dari semua jenis yang dilakukan pada sistem. David Easton adalah ilmuwan politik pertama yang menganalisis sistem politik dalam istilah sistem eksplisit membedakan dua jenis input ke dalam sistem politik, permintaan dan dukungan. Permintaan dan dukungan diterima oleh sistem dari lingkungan.

- **Tuntutan.**

Menuntut menurut Easton sebagai ekspresi pendapat bahwa alokasi otoritatif sehubungan dengan materi pelajaran tertentu harus atau tidak boleh dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Tuntutan tersebut dapat mencakup tuntutan upah dan jam kerja, undang-undang, kesempatan pendidikan, fasilitas rekreasi, jalan dan transportasi, dll. Mungkin ada tuntutan perilaku, tuntutan hak untuk memilih, hak untuk memegang jabatan, hak untuk dipilih untuk jabatan itu, untuk mengajukan petisi kepada badan dan pejabat pemerintah dan untuk mengorganisir asosiasi politik. Tuntutan membuat sistem tetap beroperasi.

- **Dukungan.**

Untuk kelangsungan sistem politik, Easton menetapkan konsep dukungan. Tidak ada sistem politik yang dapat bertahan lama tanpa dukungan masyarakat yang menjadi bagiannya. Dukungan ini mungkin,

dengan menerima keputusan sistem politik atau dengan mematuhi, adalah cara paling umum untuk menunjukkan dukungan. Masukan dari permintaan disebut sebagai bahan mentah, dari mana produk jadi yang disebut keputusan diproduksi.

Mereka tidak cukup untuk menjaga sistem politik tetap berjalan. Dengan demikian, suatu sistem politik mendapat dukungan yang cukup besar dari lingkungan. Dukungan itu terbuka dan terselubung. Dukungan terbuka adalah bentuk tindakan yang secara jelas dan nyata mendukung.

Dukungan terselubung adalah sikap dan sentimen terhadap sistem politik. Sistem politik juga menghadapi tekanan dukungan melalui beberapa cara. Menurut Easton, support stress terjadi karena kegagalan output. Dukungan politik menurun jika sistem politik gagal mengantarkan barang.

- **Proses Konversi.**

Suatu proses dimana sistem politik mengubah input menjadi output disebut proses konversi. Itu datang melalui proses seleksi, pembatasan, atau penataan ulang. Proses konversi beroperasi secara dinamis karena pemilihan dapat berlangsung selama periode waktu tertentu. Proses konversi ini tergantung pada kemampuan sistem politik untuk ekstraksi sumber daya, regulasi dan kontrol atas individu dan barang.

- **Output.**

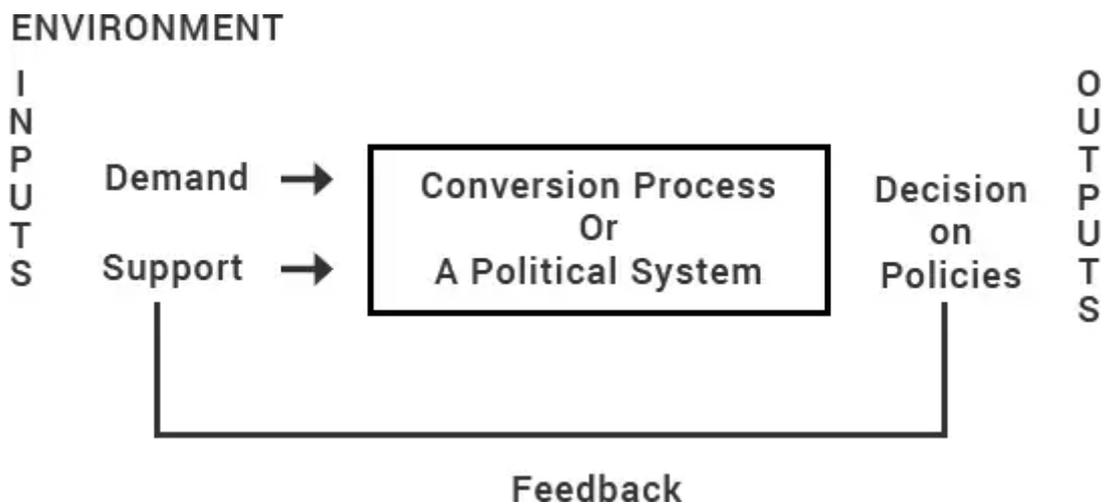
Keluaran dari sistem politik adalah keputusan penguasa. Mungkin aturan, peraturan, tindakan, hukum dan sebagainya. Pertama, keputusan otoritatif adalah aplikasi pada interpretasi aturan. Kedua, keputusan otoritatif mempengaruhi lingkungan sistem politik. Output membantu mempertahankan dukungan untuk sistem politik.

- **Input.**

Umpan balik adalah proses di mana informasi tentang kinerja sistem dikomunikasikan kembali kepadanya. Informasi ini penting bagi otoritas yang mengambil keputusan untuk sistem. Melalui loop umpan balik, sistem dapat mengambil keuntungan dari menyesuaikan perilakunya

di masa depan. Tanpa umpan balik informasi, tentang apa yang terjadi dalam sistem, pihak berwenang harus beroperasi dalam kegelapan. Ini terdiri dari produksi keluaran oleh pihak berwenang, tanggapan oleh anggota masyarakat terhadap keluaran ini, komunikasi informasi tentang tanggapan kepada pihak berwenang dan kemungkinan tindakan selanjutnya oleh pihak berwenang. Ini adalah proses siklus. Ini telah digambarkan sebagai 'model aliran' dari sistem politik. Easton mengatakan bahwa output bukanlah titik terminal. Mereka umpan balik ke dalam sistem dan yang pada gilirannya membentuk perilaku selanjutnya. Umpan balik dengan demikian memiliki pengaruh besar pada kapasitas sistem untuk bertahan (Easton, 1988)

Gambar 1. Model Teori Sistem Politik David Easton



1.4 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis akan menarik sebuah Hipotesa,

- a. FCTC ini mengancam keberadaan rokok kretek ataupun tanaman tembakau yang sudah menjadi bagian dari masyarakat negara Indonesia
- b. Pemerintahan Joko widodo dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konvensi internasional dalam pengendalian tembakau ini mendapat input dan output dari pihak diluar pemerintah.

- c. FCTC merupakan kampanye kesehatan yang menyebabkan adanya perang kepentingan antara berbagai pihak.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah mengetahui faktor-faktor yang menjadikan kenapa pemerintahan Joko Widodo belum melakukan Akses FCTC dan menganalisis dampak jika pemerintah melakukan akses.

1.6 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan diambil berdasarkan periode I Presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 2019 sampai dengan awal periode II Presiden Joko Widodo yaitu 2019 hingga 2020

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksplanatif, dimana dalam pengerjaannya penulis berupaya menjelaskan suatu fenomena dengan menghubungkan beberapa variabel. Mochtar Mas' oed menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi" bahwa eksplanatif atau eksplanasi berarti berusaha menjawab tipe pertanyaan "mengapa" (Mas' oed, 1990).

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengerjaan penelitian ini, penulis menggunakan Metode Kepustakaan (*library research*) dalam mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Metode ini menekankan pengumpulan data dengan cara mempelajari literature buku pustaka, jurnal, makalah ilmiah, majalah, surat kabar harian, berita online, internet, serta sumber-sumber lainnya yang dinilai relevan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam

penelitian ini. Jenis data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah berupa data valid dan sekunder yang tersedia.

1.7.3 Metode Analisa Data

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menganalisa penelitian ini, dimana data-data dan fakta tertulis yang diperoleh dalam kepustakaan mengenai suatu fenomena yang dikaji kemudian akan dikelola berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan penulis.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab ini berisi Latar belakang masalah tentang posisi pemerintahan Joko Widodo dalam menilai FCTC, Rumusan masalah dari paparan yang sudah ada dalam latar belakang, Landasan teori yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini, hipotesa, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

Menerangkan tentang FCTC dan industri tembakau serta budaya tembakau yang ada di masyarakat Indonesia dan berisi pembahasan tentang kondisi Indonesia yang belum melakukan akses FCTC dan kondisi didalam negara tentang posisi masyarakat yang terdampak jika akses dilakukan sekaligus menjelaskan bagaimana peranan dan faktor-faktor pemerintah era Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2020 tidak melakukan akses FCTC.

BAB III

Memaparkan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari penelitian ini.